

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KETAHANAN PANGAN DI TINGKAT KELUARGA

Oleh : Rodhiyah *

Abstrak

Poverty is a serious challenge in Indonesia, and most of the poor segments of the people are women. Poverty problems are closely related with food shortage and food security problem. When poor women faces various social problems, women empowerment is one among the must-be solutions. Women empowerment efforts can be started from economic side to enable them meeting family needs, and then gender strengthening by opening women access to meet women special needs such as education and health to enhance these women quality, as well as the quality of their families, state and nation. Many factors influence food security in the family, covering educational level, income, food consumption behaviour, family food habit, and others. Family plays an important role in the food security issue in each household. When a family could well meet its food needs, both quantitatively and qualitatively, this family's life quality will be getting better, including its women members.

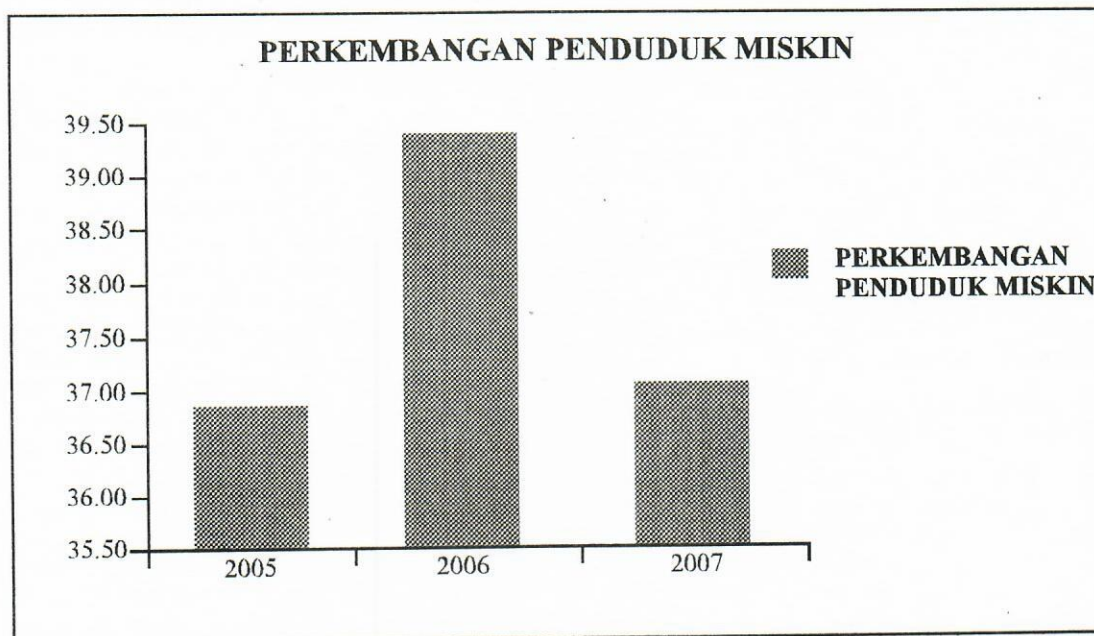
Keyword: Food Security, Gender

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan bukan merupakan persoalan yang sepele, tetapi justru kian bertambah besar dan meluas, terlebih lagi dengan adanya era globalisasi, munculnya krisis global yang berdampak juga sampai ke Indonesia, kenaikan BBM, yang berakibat daya beli masyarakat rendah khususnya untuk konsumsi makanan.

Menurut data PBB 1/3 dari penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu sekitar 70 % dari mereka adalah perempuan (Adriana Venny, 2005,4)

Menurut Catatan Badan Ketahanan Pangan menyebutkan, pada 2005 terdapat 36,80 juta jiwa penduduk miskin. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir 2005 menjadikan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,30 juta jiwa pada 2006. "Melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan jumlah penduduk miskin pada 2007 turun menjadi sebanyak 37,17 juta jiwa," (Nainggolan. Rabu, 7 Mei 2008 | 20:08 WIB),



Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan secara nasional, yaitu ditunjukkan trend positif, dan ditargetkan pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan nasional menjadi sebesar 7,2%, namun disisi lain masih di jumpai berbagai persoalan seperti yang diungkapkan oleh Kaman Nainggolan sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dalam kunjungan kerja di Bandar Lampung, Rabu (7/5/2008) mengatakan, di antara penduduk miskin sudah pasti terdapat penduduk rawan pangan yang berarti terjadi kerawanan ketahanan pangan.

Selanjutnya menurut Whitehead, 2003 menyebutkan bahwa lebih dari separo penduduk miskin di negara berkembang adalah perempuan, hal ini menunjukkan sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh kaum perempuan, dengan kata lain kemiskinan memiliki wajah perempuan (Imam Cahyono, 2005, 11) oleh karena itu masih menjadi salah satu tantangan yang cukup besar yaitu kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan yang di tunjukkan dengan rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan yaitu rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender, Indonesia di peringkat 90 (Adriana Venny, 2005, 4) dan juga rendahnya Angka Indeks Pemberdayaan Gender.

Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan disebabkan oleh faktor yang cukup kompleks, antara lain faktor ekonomi, karena perempuan mengalami kesulitan untuk dapat mengakses sumber daya ekonomi, perempuan yang ikut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga lebih miskin dibanding laki-laki, perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, dan perempuan lebih banyak memberikan waktunya untuk memproduksi barang dan pelayanan untuk keluarga (Imam Cahyono, 2005, 12-13). Berbagai persoalan persoalan yang di hadapi perempuan, dan untuk mengatasi persoalan perempuan yang berdampak pada persoalan keluarga, masyarakat, dan negara, maka perempuan-perempuan harus keluar dari belenggu kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan diri sendiri sebagai perempuan.

B. PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Perempuan

Perempuan sebagai subyek pembangunan dan juga sebagai agent of change, maka menurut Mary Wollstonecraft menyebutkan bahwa perempuan tidak saja sebagai obyek yang perlu disejahterakan, namun perempuan juga berperan besar dalam melakukan perubahan termasuk ikut

mendorong untuk menekan angka kemiskinan. (Dewi Novirianti, 2005, 46).

Indeks Pembangunan Gender Indonesia relatif masih rendah, hal ini di tunjukkan dari beberapa indikator antara lain: (1) angka harapan hidup perempuan, yaitu AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia periode 1998-2003 yakni 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI), dan di Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 101,37, (2) angka melek huruf perempuan di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 82% (3) partisipasi murid perempuan dalam 10 tahun terakhir cenderung menurun persentasenya yaitu SD 49%, ke tingkat SMP menurun menjadi 46%, di tingkat SMA menurun lagi menjadi 41%, dan di tingkat Universitas menurun menjadi 33%, (4) penghasilan perempuan, yaitu rendahnya upah perempuan di banding dengan laki-laki, (5) diskriminasi pasar kerja, yaitu data ILO menunjukkan bahwa perempuan usia produktif yang berhasil masuk dalam angkatan kerja sebesar 37,2%, (6) kepala rumah tangga perempuan yaitu dari setiap 10 rumah tangga ada 10% yang dikepalai oleh perempuan dan 80% dari angka tersebut adalah janda, 60% kepala rumah tangga tidak sekolah dan 40% buta huruf (BPS tahun 2000). (7) rumah tangga miskin berjumlah 7,87 juta dengan komposisi 0,96 juta di kepalai oleh perempuan (BPS 1999). Sedangkan kondisi di Jawa Tengah juga menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu penduduk miskin kategori BPS Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdapat 3.172.210 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan rincian 348.893 Rumah Tangga kategori Sangat Miskin, 1.544.513 kategori miskin dan 1.277.795 kategori hampir miskin (Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2008).

Berbagai persoalan yang dihadapi perempuan menunjukkan bahwa perempuan tingkat pemberdayaannya relatif masih rendah, yaitu masih adanya ketidak-setaraan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan antara lain sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, lapangan kerja, dan kesempatan-kesempatan lain yang memungkinkan perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Oleh karena itu perlu meningkatkan pemberdayaan yang meliputi pemberdayaan untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, agar perempuan dapat mengubah, memperbaiki hidup perempuan untuk dapat menyumbangkan upaya menekan angka kemiskinan. Seperti yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan millenium, yang selambat-lambatnya tahun 2015 dapat tercapai Millenium Development Goals (MDGs) antara lain: (1) Melenyapkan kemiskinan dan kelaparan yang

ekstrim, (2) Mencapai pendidikan primer yang universal, (3) Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Menekan angka kematian anak, (5). Memperbaiki kesehatan kehamilan, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) Memastikan ketahanan lingkungan, (8) Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan.

Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada goals ke 3 MDGs merupakan salah satu goals yang perlu di capai dalam pembangunan millenium, hal ini akan berimbang pada goals yang lain antara lain : jika perempuan berdaya, maka akan melenyapkan kemiskinan dan kelaparan, jika perempuan berdaya akan menekan angka kematian anak dan memperbaiki kesehatan kehamilan, jika perempuan berdaya akan melenyapkan kemiskinan dan kelaparan, serta goals- goals yang lain.

Pengertian Pemberdayaan menurut (PREM Group- World Bank) merupakan proses peningkatan kapasitas seseorang atau kelompok dalam menentukan pilihan guna melakukan suatu aksi atau output yang diinginkan, selanjutnya menurut Ruth Alsop and Andrew Norton, bahwa Pemberdayaan merupakan kombinasi antara dua faktor yang saling terkait yakni agen (agency) dan struktur peluang. Agency adalah kemampuan seseorang dalam menentukan pilihan yang berarti baginya, sedangkan struktur peluang adalah berbagai aspek yang membuat seseorang dapat berbuat sesuatu karena kemampuannya untuk memilih. (Dewi Novirianti, 2005, 46-47).

Pemberdayaan adalah suatu konsep yang mengandung makna perubahan yang terjadi pada diri seseorang atau dengan kata lain pemberdayaan diri seseorang, dimana dalam kesehariannya dalam melakukan pekerjaan tidak lagi ketergantungan pada orang lain serta mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tugas (Ismail Said, 2003, 21), Pemberdayaan merupakan cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan dari staf (lingkungan) (Stewart, 1998, 22).

Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Meutia Hatta (2006, 107) Ada dua kelompok besar kaum perempuan : Pertama adalah mereka yang masih harus diberdayakan, artinya mereka sebenarnya masih tertinggal. Di dalam bidang pendidikan mereka tertinggal, mereka juga tidak punya cukup akses untuk kerja, peluang ekonomi kecil, juga kesehatan mereka masih kurang baik. Kedua perempuan-perempuan yang sudah berdaya, mereka punya potensi yang bisa mereka kembangkan, atau mereka punya kemampuan

untuk melakukan pemberdayaan diri sendiri, self empowerment. Dengan begitu mereka mempunyai kemampuan lebih untuk menolong kaumnya yang masih berada di tingkat yang perlu di berdayakan, yang masih disempowered. Perempuan harus berdaya. Harus ada pemberdayaan, kesetaraan, keadilan juga perlindungan, artinya kesetaraan dan keadilan gender itu harus mulai dari keluarga sampai ke kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya Meutia Hatta juga mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah serangkaian upaya sistematis kemampuan perempuan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, kesempatan mereka berpartisipasi menjadi pelaku pembangunan, untuk menikmati, juga kesempatan untuk menjadi pengambil keputusan dalam kehidupan ekonomi mereka. Supaya perempuan akhirnya mampu mengatur dirinya sendiri, meningkatkan rasa percaya diri (self confidence) untuk memilih perannya serta mampu berpartisipasi aktif membangun kehidupan dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui banyak strategi, antara lain dengan pengorganisasian dan mobilisasi sumber daya lokal, termasuk sumber daya financial, tenaga, pengetahuan, intelektualitas, rasa saling percaya dan saling menghargai serta solidaritas. (Titik Hartini, 2006, 78). Selanjutnya Titik Hartini mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan di lakukan dalam dua tataran yaitu : Pertama, di tingkat komunitas berupa pembentukan kelompok-kelompok perempuan yang menjadi konsumen kritis dan produsen kebutuhan sehari-hari bagi diri, keluarga dan komunitasnya, Kedua, di tingkat regional dan nasional melalui di bentuknya organisasi jaringan yang dapat memberi kekuatan politis bagi perempuan, kegiatan-kegiatan tersebut di organisir dan organisasinya harus peka terhadap isu-isu politik kontemporer, dan siap melakukan advokasi kapan saja.

Menurut ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil) bahwa pemberdayaan perempuan sebagai sesuatu yang memungkinkan perempuan mengambil posisi yang setara dan mengkritisi secara seksama proses pembangunan yang selama ini merugikan perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan berarti mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami perempuan dan laki-laki di segala bidang. Setara disini artinya mempunyai andil dan kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan di semua tingkat yaitu keluarga, masyarakat dan negara.

Berangkat dari persoalan-persoalan nyata perempuan, pengalaman hidup perempuan sehari-

hari, dan realitas sosial yang ada, maka pemberdayaan perempuan di mulai dari ruang ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, akan tetapi menurut (Dewayani dkk,2004,140) untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, maka penguatan ekonomi di kombinasikan dengan penguatan gender dengan membuka akses perempuan untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan seperti pendidikan, kesehatan

Menurut Sara Longwe (1999) bahwa pemberdayaan perempuan ada lima tingkatan yaitu : tahap (1) kesejahteraan, (2) akses, (3) kesadaran kritis, (4) partisipasi, dan (5) kontrol. Sedangkan ASPPUK dalam kegiatan pemberdayaan perempuan menggunakan dua strategi yaitu pengorganisasian perempuan dan advokasi kebijakan. (Titik Hartini, 2006, 81).

Ketika perempuan sudah berdaya, punya potensi yang bisa mereka kembangkan, punya kemampuan untuk melakukan pemberdayaan diri sendiri, self empowerment, serta mampu berpartisipasi aktif membangun kehidupan dan kesejahteraannya, maka tidak akan terjadi tragedi kelaparan pada anak-anak balita, kekurangan gizi dan gizi buruk pada bayi dan balita, karena bayi dan balita tidak akan lepas dari "peran ibu" (peran perempuan), tidak terjadi kematian ibu pada saat kehamilan dan persalinan, oleh karena itu perempuan mempunyai kesempatan untuk menjadi pengambil keputusan khususnya dalam kehidupan ekonomi mereka yang akan berimbas pada ketahanan pangan di tingkat keluarga.

Berbagai kegiatan untuk penguatan dan pemberdayaan perempuan telah dilakukan oleh berbagai pihak, pemerintah, NGO atau LSM-LSM yang mempunyai kepedulian terhadap realita sosial perempuan, antara lain KPP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan) mengeluarkan kebijakan : Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), untuk pengembangan usaha ekonomi mikro dan kecil yang banyak diminati kaum perempuan, Desa Prima (Perempuan Indonesia Mandiri) proyek pengembangan ekonomi perempuan pedesaan melalui potensi lokal. Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak agar perempuan dan anak bisa mengakses berbagai informasi dan layanan publik.

ASPPUK lebih mengfokuskan pada kegiatan "Pemberdayaan Perempuan Basis" yang isinya fasilitasi informasi, pembukaan akses pasar untuk produk perempuan pengusaha mikro, dan pelatihan pelatihan melalui LSM-LSM anggota, dan kegiatan ASPPUK lebih berkembang yaitu kegiatannya adalah memayungi pemahaman,

pendekatan dan strategi anggota-anggotanya dan membangun jaringan dan asosiasi kelompok di tingkat wilayah melalui tangan-tangan LSM anggota.

2. Ketahanan Pangan di Tingkat Keluarga

Kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan makanan yang biasa di pengaruhi oleh ketersediaan menu bergizi, ketika kemampuan masyarakat sudah menurun ketersediaan menu bergizi semakin sulit ditemukan dalam keluarga, akan terjadi gizi buruk dan secara langsung menunjukkan terjadinya kerawanan pangan, kondisi ini terlihat bahwa ketahanan pangan di tingkat keluarga masih rawan.

Menurut UNICEF bahwa penyebab gizi buruk adalah asupan zat gizi yang kurang dan penyakit infeksi, kedua hal tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor tak langsung yaitu ketersediaan pangan keluarga rendah, praktek kesehatan yang tidak benar termasuk di dalamnya adalah pola asuh dan perawatan ibu-anak, serta pelayanan kesehatan yang rendah, lingkungan yang buruk dan tidak sehat (Endang Purwaningsih dkk, 2006).. kesemuanya bermuara pada kemiskinan dan kebodohan akibat langsung dari kebijakan politik dan ekonomi yang kurang kondusif.

Mengacu Deklarasi Roma, bahwa Ketahanan pangan adalah kondisi setiap orang di semua keluarga yang ada memiliki akses fisik dan ekonomi dalam mengkonsumsi pangan untuk aktivitas dan kesehatan masing-masing.

Indikator yang dimaksud dalam ketahanan pangan menyangkut ketersediaan atau kecukupan pangan di tingkat individu, tentunya dengan mempertimbangkan aspek fisik, aktivitas dan kesehatan, asupan protein serta energi individu terutama kelompok rentan terhadap defisiensi zat gizi yaitu balita dan ibu-ibu di tingkat individu, keluarga dan masyarakat, serta kesehatan dan gizi pada kelompok rentan lain terutama berkaitan dengan konsumsi bahan pangan dan nutrien.

Ketahanan pangan menunjukkan eksistensinya, jika setiap rumah tangga selalu dapat mengakses, secara fisik maupun ekonomi, memperoleh pangan yang cukup aman dan sehat bagi seluruh anggotanya (FAO, 1996). Artinya, titik berat kondisi ketahanan pangan terletak pada tingkat rumah tangga dan keluarga.

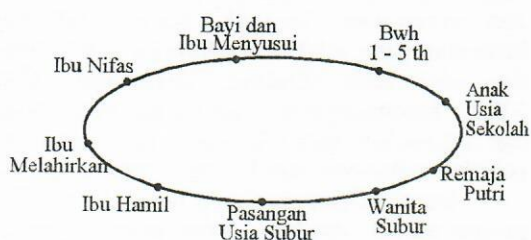
Ketahanan pangan ini harus mencakup aksesibilitas, ketersediaan, keamanan dan kesinambungan. Aksesibilitas di sini artinya setiap rumah tangga mampu memenuhi kecukupan pangan keluarga dengan gizi yang sehat. Ketersediaan pangan adalah rata-rata pangan dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan

konsumsi di tingkat wilayah dan rumah tangga. Sedangkan keamanan pangan dititik beratkan pada kualitas pangan yang memenuhi kebutuhan gizi. (Martaja, 2005).

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan, (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun (3 aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan),(4) kualitas/keamanan pangan.

Berdasarkan konsep FAO dan Unicef, bahwa ketika ketersediaan pangan keluarga rendah, maka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan keluarga juga rendah, dan akan berimbas pada penyebab gizi buruk bayi dan balita serta kesehatan ibu dan anak.

Siklus hidup perempuan dimulai dari bayi lahir sampai ibu melahirkan.



Rumah tangga (biasa) menurut definisi Susenas adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur atau pengurusan kebutuhan bersama sehari-hari dibawah satu pengelolaan.

Keluarga adalah unit organisasi terkecil yang ada di masyarakat, sedangkan menurut (Horton dkk), bahwa keluarga adalah suatu system norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting (Paul B. Horton, Chester L. Hunt 1991, 267).

Beberapa istilah /definisi tentang keluarga yaitu

- (1) suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama,
- (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah atau perkawinan;
- (3) pasangan perkawinan dengan anak atau tanpa anak..

Sedangkan menurut(UU RI N0 10 Tahun 1992) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera , bahwa yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau

suami-istri dan anak atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Bab I pasal 10).

Komposisi kelompok keluarga pada umumnya di bagi dalam :

1. Conjugal family atau keluarga batih atau nuclear famili, yaitu keluarga karena pertalian perkawinan atau kehidupan suami istri dan anak atau tanpa anak.
2. Extended family atau keluarga luas yaitu keluarga batih berikut kerabat lain dengan siapa hubungan baik dipelihara
3. Consanguine family yaitu keluarga hubungan sedarah dan tidak berdasarkan pertalian kehidupan suami istri, melainkan pada pertalian darah dari sejumlah orang kerabat.
4. Perkawinan neolokal yaitu pasangan suami-istri tinggal bersama keluarga suami.
5. Perkawinan matrilokal, yaitu pasangan suami-istri tinggal bersama keluarga istri.

Tujuan keluarga adalah membentuk keluarga yang sejahtera yaitu : Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiail yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras , dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (UU RI N0 10 Tahun 1992 Bab I pasal 11). Sedangkan menurut Agama Islam "Menuju keluarga yang Sakinah, Mawadah wa Rokhmah" .

Keluarga berperan besar terhadap masalah ketahanan pangan di dalam rumah tangga. Banyak faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di dalam keluarga. Tingkat pendidikan, pendapatan, perilaku konsumsi pangan, kebiasaan pangan yang ada dalam keluarga dan sebagainya. Ibu adalah salah satu anggota keluarga yang mempunyai peran penting dalam menyediakan makanan bagi keluarga sehingga pengetahuan, sikap serta kesukaannya terhadap pangan akan menentukan kebiasaan makan keluarga.

Hasil penelitian Siti Aliyatun (2003), di Kabupaten Semarang bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal seorang ibu, semakin mudah ia menyerap informasi gizi dan kesehatan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi yang tinggi memungkinkan ibu tanggap terhadap masalah gizi di dalam keluarga dan mampu mengambil tindakan secepatnya. Ibu yang berpendidikan tinggi mampu memilih makanan yang murah namun bernilai gizi untuk disajikan kepada seluruh anggota keluarga terutama balita. Temuan Prita Widayastuti (2004) di Kabupaten Wonogiri, Dyah Mardiningsih di Semarang menunjukkan ibu adalah penentu menu dan pendistribusian makanan dalam keluarga, dan yang didahulukan adalah untuk anak kecil, akan

tetapi ada sebagian kecil keluarga yang mendahulukan ayah, sebagai kepala rumah tangga juga karena sebagai pencari nafkah utama di luar rumah. Temuan Dewi Firdaus (2003) mengatakan bahwa Ibu yang bekerja, pada satu sisi berdampak positif bagi peningkatan pendapatan namun di sisi lain berdampak negatif terhadap pembinaan atau pemeliharaan anak. Perhatian terhadap pemberian makan terhadap anak yang semakin berkurang, dapat menyebabkan anak menderita kekurangan gizi, yang akan berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang dan perkembangan anak. Ibu yang bekerja di luar rumah, para pengasuh BATITA dapat lebih mudah memberikan sumber karbohidrat dalam berbagai bentuk hidangan dengan rasa yang disukai BATITA seperti mie instant, mie rebus, dan bermacam kue/jajanan.

Dyah Mardiningsih (2002) menemukan, ketika harga beras mahal sebagian besar ibu tetap memilih mengkonsumsi beras tetapi dengan mengurangi jumlah dan kualitas lauk pauk, hanya sedikit ibu yang mencari alternatif pengganti beras sebagai makanan pokok. Faktor yang menentukan kebiasaan makan keluarga adalah pendidikan kepala keluarga, istri, pendapatan per kapita keluarga, jenis kelamin penentu konsumsi keluarga, pendidikan dan pengetahuan gizi, sebelumnya Dyah Mardiningsih (2001) menemukan bahwa wanita yang berpendidikan rendah mempunyai kemampuan yang sangat terbatas terhadap makanan yang bergizi untuk dikonsumsi keluarganya. (Endang Purwaningsih dkk, 2006)

Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat di bedakan menjadi tiga kategori yaitu : (PPK-LIPI. 2004) . Rumah Tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki persediaan pangan/makanan pokok secara kontinyu (diukur dari persediaan makan selama jangka masa satu panen dengan panen berikutnya dengan frekuensi makan 3 kali atau lebih per hari serta akses langsung) dan memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati atau protein hewani saja.

1. Rumah tangga kurang tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki:

- Kontyuitas pangan/makanan pokok kontinyu tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein nabati saja
- Kontinuitas ketersediaan pangan/makanan kurang kontinyu dan mempunyai pengeluaran untuk protein hewani dan nabati

3. Rumah tangga tidak tahan pangan adalah rumah tangga yang dicirikan oleh:

- Kontinuitas ketersediaan pangan kontinyu, tetapi tidak memiliki pengeluaran untuk protein hewani maupun

nabati

- Kontinuitas ketersediaan pangan kontinyu kurang kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani atau nabati, atau tidak untuk kedua-duanya.
- Kontinuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu walaupun memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
- Kontinuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein nabati saja, atau tidak untuk kedua-duanya.

Hasil penelitian Dyah Mardiningsih (2004) di desa Majir Kab. Purworejo mengatakan kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi sikap ibu dalam mengambil keputusan untuk menentukan sumber protein asal ternak khususnya dari ternak unggas (telur & daging). Protein hewani seperti telur ayam kampung oleh masyarakat Desa Majir, tidak dikonsumsi untuk lauk pauk, tapi telur tersebut dieramkan kemudian ditetaskan dan dipelihara untuk dijadikan ayam pedaging, ada pula yang sebagian untuk dijual, dengan alasan harga telur ayam kampung cukup tinggi dipasaran dan hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi keluarga yang harganya lebih murah, seperti tahu / tempe yang kandungan protein lebih rendah dibandingkan telur ayam. Masyarakat desa Majir lebih banyak mengkonsumsi sayuran, karena mereka dapat langsung mengambil dari pekarangan. Penelitian Suwanto (2000) mengatakan protein nabati yang banyak dikonsumsi adalah tempe dan tahu, hampir setiap hari ada di rumah, Temuan Ari Kurnia Yuristanti (2000) dalam Suwanto (2000) mengatakan kesadaran masyarakat kota Surakarta dalam mengkonsumsi tempe tergolong tinggi, di dukung kenyataan bahwa tempe merupakan bagian integral dari budaya masyarakat kota Surakarta, dan tahu merupakan barang substitusi bagi tempe. (Endang Purwaningsih dkk, 2006)

Kemampuan dan posisi perempuan dalam mengelola kebutuhan pangan keluarga mencerminkan siklus ekologi kehidupan, artinya jika alam dikelola secara maskulin dan dieksploitasi, maka posisi perempuan kan terancam degan bertambahnya beban kerja dalam menggenapikebutuhan hidup seisi rumah, jika perempuan diabaikan dalam mengolah alam maka alampun akan terluka dan kembali perempuan yang lebih dulu menanggung perihnya. (Nur Azizah, 2008, 65-66)

Tercukupinya kebutuhan pangan dalam keluarga dengan gizi yang seimbang, akan menghindarkan anggota keluarga mulai dari ibu

hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan manula dari berbagai macam penyakit. Perilaku pangan sangat mempengaruhi keadaan individu yang berhubungan kondisi tubuhnya. Gizi Buruk yang banyak melanda balita dan anak-anak yang ada di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya dapat teratasi jika perempuan sudah berdaya secara ekonomi, aksesibilitas, kesadaran kritis, partisipasi aktif membangun kehidupan dan kesejahteraannya, dan semua pihak sadar akan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangganya (keluarga).

C. PENUTUP

Kemiskinan merupakan potret perempuan, ketidak berdayaan perempuan akan mempengaruhi kehidupan keluarga, ketika perempuan ikut mencari nafkah dan mempunyai penghasilan, di gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, perempuan yang mempunyai penghasilan kemungkinan kecil anak-anak menderita kekurangan gizi.

Konsepsi piwulang Jawa, perempuan dalam konsep pendidikan dalam naskah Jawa Wulang Estri, bahwa perempuan mempunyai kriteria :

- (1) perempuan harus cakap, mampu melaksanakan tugas dan seluk beluk ke rumahtangga, memiliki kelebihan management dalam mengatur rumah tangga,
- (2) perempuan harus cermat, mampu memiliki perhitungan yang baik dalam mengatur segala kegiatan rumah tangga,
- (3) perempuan harus tanggap, mampu menyesuaikan diri dengan situasi menjaga hubungan keluarga dan lingkungan,
- (4) perempuan harus trampil, mampu bekerja dengan trampil,
- (5) perempuan harus cekatan, bisa mengfokuskan diri pada ketrampilan bekerja yang cekatan.

Ibu (perempuan) adalah salah satu anggota keluarga yang mempunyai peran penting dalam penyediaan makanan bagi keluarga. Keluarga berperan besar terhadap masalah ketahanan pangan di dalam rumah tangga yang di pengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, praktek konsumsi pangan, kebiasaan pangan yang ada dalam keluarga.

Ketahanan pangan tidak terlepas dari pertimbangan aspek fisik, ekonomi, aktivitas dan kesehatan. Ketika pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dengan gizi seimbang maka tidak akan terjadi gizi buruk, busung lapar, maupun kerawanan pangan dan dapat menghindarkan

anggota keluarga dari bermacam-macam penyakit, termasuk anggota keluarga kelompok rentan, anak menjadi investasi di masa depan untuk menjadi manusia yang mumpuni dan berkualitas sehingga dapat bersaing dalam dunia global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, Jawa Tengah Dalam Angka 2007, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
- , Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pedesaan : Konsep dan Ukuran Tim penelitian Ketahanan pangan dan kemiskinan dalam konteks Demografi Puslit Kependudukan -LIPI Seri Penelitian PPK-LIPI, Jakarta No. 56/2004.
- , Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah, Hasil SUSENAS 2006. Badan Pusat Statistik Prop Jawa Tengah
- , Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah, Hasil SUSENAS 2006. Badan Pusat Statistik Prop Jawa Tengah 2007
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, BKKBN, Jakarta, 1992.
- Adriana Venny, Perempuan Dalam Dimensi Kemiskinan, (Prolog, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, No 42, 2005).
- Dewayani dkk, Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa, (Bandung: ASPPUK dan AKATIGA, 2004)
- Dewi Novirianti, Pemberdayaan Hukum Perempuan Untuk Melawan Kemiskinan, (Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, No 42, 2005).
- Endang Purwaningsih, Rodhiyah, Dyah Mardiningih, Retno Murwani, Kajian Strategik Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga di Jawa Tengah, Dewan Riset Daerah Jawa Tengah, 2006)
- Imam Cahyono, Wajah Kemiskinan Wajah Perempuan, (Jurnal Perempuan, Yayasan unal Perempuan, Jakarta, No 42, 2005).
- Ismail Said, Tantangan Pemberdayaan SDM Apartur (dalam Good Governance, Vol 2, No, 1 Maret 2003, Program Magister STIA-LAN.)
- Martaja, Solidaritas Nasional Ketahanan Pangan, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0510/0pii02.html>, 26 Oktober 2005, Gsianturi.
- Meutia Hatta, Perempuan harus mendapatkan kesetaraan, keadilan, juga perlindungan, (Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, No 50, 2006).

Nur Azizah, 2008, 59)Pembangunan, Kemiskinan dan Luka Perempuan, 59 (66)

Paul B. Horton, Chester L. Hunt, Sosiologi, Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1991.

Stewart, Empowering People Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Titi Hartini, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, (Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, No 50,2005).